

BAB III

KINERJA PENGABDIAN DAN PENGEMBANGAN

A. Kinerja Pengabdian

1. Lama pengabdian dan Pengalaman Kerja

Pengabdian sebagai tenaga Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan dimulai pada tahun 2005 di Puskesmas Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, tugas utama yang dilakukan sebagai tenaga fungsional khusus perawat dan ditempatkan dibagian pelayanan umum, tugas utamanya melakukan pemeriksaan pada pasien kunjungan poli umum baik bersifat promotive, preventif kuratif maupun rehabilitative juga berkoordinasi dengan tim kesehatan lainnya dan kolaborasi dengan program program Kesehatan yang lain.

Tahun 2011 mutasi kedinasan ke Puskesmas Pembantu (Pustu) Kumpai Batu Bawah wilayah kerja Puskesmas Kumpai Batu Atas, selama dinas di Puskesmas Kumpai Batu Bawah menjadi tantangan dikarenakan semua program kesehatan dasar dilakukan secara mandiri dengan mengambil keputusan yang cepat dan tepat sesuai dengan standar kebutuhan Masyarakat. Pelayanan tetap diutamakan secara promotive, preventif, kuratif dan rehabilitasi sederhana. Kolaborasi tetap dilakukan dengan Puskesmas Induk yaitu Puskesmas Kumpai Batu Atas, menjalin Kerjasama dengan kader Kesehatan, tokoh Masyarakat dan aparat desa. Tuntutan untuk mandiri, responsive dan multifungsi dan mampu menangani berbagai kondisi dengan sumber daya terbatas.

Tahun 2017 mutasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai pengelola Program Surveilans dan Imunisasi, dengan tugas pokok mengelola, melaksanakan memantau dan mengevaluasi program surveilans epidemiologi dan imunisasi di wilayah Kabupaten dengan membawahi 18 Puskesmas di wilayah Dinas Kesehatan, tantangan sebagai pengelola program Surveilans dan Imunisasi lebih berat lagi . sebagai pengelola program di tuntun untuk Menyusun rencana kerja kegiatan tahunan, menghimpun dan menganalisis data epidemiologi dan cakupan imunisasi, Menyusun laporan, melakukan investigasi bila terjadi KLB atau kaus yang berkaitan dengan Surveilans dan Imunisasi. Memastikan ketersediaan vaksin dan logistic

imunisasi di seluruh fasilitas pelayanan Kesehatan(18 Puskesmas), melakukan supervisi ke Puskesmas dan fasilitas Kesehatan lainnya, melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sector serta bekerjasama dengan instansi vertical yaitu Dinkes Provinsi dan Kementerian Kesehatan, melakukan penyuluhan dan edukasi kepada Masyarakat dan tokoh Masyarakat tentang program Surveilans dan Imunisasi dan membuat laporan setiap kegiatan. dan selama pengabdian di Dinas Kesehatan cakupan imunsasi mencapai target. Tahun 2020 menjadi tantangan tersendiri dikarenakan terjadi wabah COVID 19, sebagai pengelola program menjadi bertambah beban program dikarenakan terbatas ruang gerak tetapi tetap menjalankan program dengan standar pelayanan pada saat pandemic, pelaporan data yang terimbas penyakit covid 19 didata setiap hari dan tetap dilaporkan serta tetap memberikan edukasi pada petugas di 18 Puskesmas untuk Bersama sama melakukan pelayanan Kesehatan secara maksimal sesuai standar pelayanan di masa pandemic.

Tahun 2021 pindah mutasi ke bidang Kesehatan Masyarakat sebagai Pengelola Program Kesehatan Kerja dan Olah Raga (KESJAOR), sebagai pengelola program baru dibidang Kesehatan Masyarakat dituntut untuk lebih dalam mempelajari program ini, pada program ini intinya tupoksi pekerjaan sama dengan program surveilans dan imunsasi, hanya saja pengelola program ini lebih mengarahkan ke Kesehatan usia produktif yaitu dengan melakukan pembinaan an pemantauan Kesehatan tenaga kerja formal dan informal, mengembangkan program Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) dan sudah terbentuk di beberapa wilayah dan selalu mendapat pengawasan dan pelatihan dari timprogram kami, mendorong terbentuknya K3, dan memberikan pelayanan pemeriksaan Kesehatan secara rutin Kerjasama dari poli Kesehatan pekerjainformas, Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Selalu melakukan promosi Kegiatan GERMAS dan sudah dilakukan di Dinas Kesehatan dengan Olah Raga senam pagi setiap Jumat pag dan menerapkan Program GERMAS di 18 Puskesmas dan Masyarakat sekitar,

Tahun 2022 mutasi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Bidang Kedaruratan dan Logistik, ini menjadi lebih tertantang dikarenakan Kabupaten Kotawaringin Barat sering terjadi bencana terutama kebakaran hutan dan lahan dan terjadi banjir hal ini tidak menyurutkan tekad

dan semangat sebagai abdi negara untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat.

Sebagai tenaga perawat dan merangkap tenaga struktural tupoksi selama berdinastis di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ikut serta dalam rangkaian kegiatan selama terjadi bencana, dan tahun 2022 di mulai bulan february dan bulan terjadi kejadian bencana karhutla, bulan Juni terjadi bencana banjir di beberapa wilayah yang lokasi daerahnya lebih rendah dari permukaan tanah, yaitu wilayah Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Arut Selatan. Puncak dari bencana banjir di bulan Oktober hingga mencapai ketinggian 2 meter hal ini berlangsung sampai bulan Nopember 2025.

Tabel 1.6.
Jumlah Kejadian Bencana Banjir Berdasarkan Data DIBI 2019 - 2022

NO	BULAN	JUMLAH BENCANA BANJIR			
		2019	2020	2021	2022
1.	Januari	1	1	0	0
2.	Febuari	0	2	0	0
3.	Maret	2	2	0	0
4.	April	0	0	0	0
5.	Mei	0	1	2	0
6.	Juni	1	3	0	2
7.	Juli	0	1	0	0
8.	Agustus	0	0	0	0
9.	September	0	1	0	0
10.	Oktober	0	3	0	1
11.	November	0	0	0	0
12.	Desember	0	0	0	0
TOTAL		4	14	2	3

Sumber: DIBI BNPB 2023

Tabel 1.7. Potensi Bahaya Banjir Per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	KECAMATAN	LUAS BAHAYA (HA)				KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI	TOTAL	
1	Arut Selatan	9.682,16	77.320,42	57.888,67	144.891,25	TINGGI
2	Arut Utara	8.680,75	43.221,97	26.719,68	78.622,40	TINGGI
3	Kotawaringin Lama	5.770,98	27.561,14	21.102,31	54.434,43	TINGGI

Tabel 1.8.
Jumlah Kejadian Bencana Karhutla Berdasarkan Data DIBI 2019 - 2023

NO	BULAN	JUMLAH BENCANA KARHUTLA				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Januari - Juni	4	2	13	3	2
2.	Juli - Desember	0	2	4	0	0
TOTAL		4	4	17	3	2

Tabel 1.9.
Potensi Bahaya Kebakaran Hutan Per Kecamatan Di Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	KECAMATAN	LUAS BAHAYA (HA)				KELAS RISIKO
		RENDAH	SEDANG	TINGGI	TOTAL	
1	Arut Selatan	92.550,05	26.460,75	136.105,81	255.116,62	TINGGI
2	Arut Utara	91.952,95	29.084,42	143.358,74	264.396,11	TINGGI
3	Kotawaringin Lama	37.971,15	7.437,86	73.650,59	119.059,60	TINGGI
4	Kumai	199.084,11	11.252,63	56.612,69	266.949,43	TINGGI
5	Pangkalan Banteng	35.105,30	13.067,45	74.406,58	122.579,33	TINGGI
6	Pangkalan Lada	1.776,62	6.534,76	12.451,65	20.763,03	TINGGI
KOTAWARINGIN BARAT		458.440,18	93.837,87	496.586,06	1.048.864,12	TINGGI

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, Tahun 2023

Tabel 1.10.
Data Bencana Per Desa Di Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	DESA/KELURAHAN	BANJIR	KARHUTLA	GELOMBANG EKSTREM	BANJIR BANDANG	CUACA EKSTREM
1	Kotawaringin Hulu	v				
2	Lalang	v				
3	Sakabulin		v			
4	Tempayung		v			
5	Rungun	v				
6	Candi	v	v			
7	Batu Belaman		v			
8	Keraya		v	v		
9	Kubu		v			
10	Bumi Harjo					v
11	Kumai Hilir	v	v			
12	Kumai Hulu	v	v			
13	Sebuai		v			
14	Sebuai Timur		v			
15	Sungai akau		v			
16	Sungai Kapitan	v	v			v
17	Sungai Tendang		v			
18	Sungai Sekonyer	v	v			
19	Amin Jaya	v				
20	Arga Mulya	v				
21	Karang Mulya	v				
22	Karang Sari	v				v
23	Kebun Agung	v				

24	Marga Mulya	v	v			
25	Natai Kerbau	v				v
26	Sungai Hijau	v			v	
27	Sungai Pakit	v				
28	Lada Mandala Jaya	v				
29	Pandu Sanjaya	v				
30	Pangkalan Dewa	v			v	
31	Sungai Rangit Jaya		v			
32	Sungai Melawen	v				

Sumber: BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat

Kegiatan selama terjadi bencana baik kebakaran hutan dan lahan maupun banjir ada beberapa tupoksi yang dilakukan:

a) Pengaktifan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops)

Sebagai pusat untuk memantau situasi setiap hari dengan mengumpulkan informasi dari sumber BMKG, Masyarakat, relawan dan Tim Reaksi Cepat pada saat di lapangandan menjadikan pusat komando dan koordinasi.

b) Kaji cepat (Rapid Assessment) dan Pemutakhiran Data

Turun langsung ke lapangan Bersama dengan TRC BPBD ke lokasi-lokasi terdampak banjir untuk mengidentifikasi tingkat keparahan banjir, wilayah yang terendam, jumlah kepala keluarga (KK) dan jiwa yang terdampak, jumlah pengungsi, kerusakan infrastruktur, serta kebutuhan mendesak (pangan, air bersih, medis, tempat tinggal sementara). Serta selalu memperbaharui data secara berkala dan melaporkannya kepada pimpinan dan pihak terkait.

c) Evakuasi dan penyelamatan dan evakuasi warga yang terjebak atau terisolasi di daerah banjir terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil dan penyandang disabilitas dengan menggunakan perahu karet dan juga kendaraan seperti truck untuk dibawa ke tempat pos pengunsian yang telah disediakan secara aman dari lokasi banjir.

d) Pendirian dan Pengelolaan Posko Pengungsian

Bekerjasama dengan pihak terkait dan SKPD lain untuk menentukan lokasi posko pengungsian, mendirikan tenda pengunsian, membuka dapur umum di titik titik posko pengunsian, bekerjasama dengan dinas social untuk memfasilitasi sanitasi darurat (toilet.MCK), memastikan data pengungsi akurat sebagai bahan pelaporan.

e) Pendistribusian Bantuan Logistik Dasar:

Mendistribusikan bantuan kebutuhan dasar baik pangan dan sandang bantuan baik dari Pemerintah, Swasta, maupun dari Masyarakat yang tidak terdampak bencana. Mengelola Gudang logistic untuk memastikan kelancaran distribusi.

f) Koordinasi pelayanan darurat

Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas dan tim medis relawan untuk pendirian posko Kesehatan darurat di tempat pengungsian,

g) Pengelolaan informasi dan layanan public

Menyampaikan informasi yang akurat dan terkini kepada Masyarakat tentang kondisi banjir terkini, dan himbauan keselamatan, lokasi pengungsian, dan posko bantuan.

h) Menjaga ketertiban dan keamanan

Koordinasi dengan pihak Kepolisian, TNI, dan Satpo PP, untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi bencana dan posko pengungsian mencegah penjarahan atau Tindakan criminal lainnya.

i) Koordinasi dengan berbagai pihak

Menjadi koordinator utama bagi seluruh elemen yang terlibat dalam penanganan darurat termasuk TNI POLRI, BASARNAS, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, relawan, dunia usaha dan Masyarakat.

j) Pelaporan situasi

Melaporkan perkembangan situasi terkini dan upaya penanganan secara berkala kepada Bupati Kotawaringin Barat, BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah dan BNPB.

k) Dokumentasi

Mendokumentasikan seluruh kegiatan respon darurat baik melalui fot, video maupun catatan tertulis sebagai bahan evaluasi dan laporan.

Tahun 2023 sampai sekarang dimutasi kebagian keuangan sebagai bendahara pengeluaran dikarenakan adanya mutase bendahara pengeluaran sebelumnya dikarenakan ada promosi jabatan yang baru, dan karena kurangnya SDM PNS.

2. Tugas dan Tanggungjawab

Sebagai pengelola data di bidang kedaruratan dan logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki peran

krusial dalam memastikan penanganan bencana yang berkaitan dengan situasi kedaruratan dan kebutuhan logistic bencana. Secara umum tugas dan tanggung jawab pengelola data di bidang kedaruratan dan logistic meliputi :

1. Kedaruratan Bencana

- a) Pengumpulan data kejadian bencana : mengumpulkan informasi awal tentang jenis bencana, lokasi, waktu kejadian, skala, dampak dan potensi ancaman lanjutan.
- b) Identifikasi korban dan kelompok rentan : mendata jumlah korban (meninggal, luka-luka,hilang) serta mengidentifikasi dan mencatat data kelompok rentan (anak-anak,lansia,penyandang disabilitas) yang membutuhkan perhatian khusus.
- c) Pengkajian cepat kerusakan dan kerugian : mengumpulkan data kerusakan infrastruktur, fasilitas umum,rumah tinggal dan estimasi kerugian material akibat bencana.
- d) Inventarisasi gangguan pelayanan public : mencata data gangguan pada pelayanan dasar seperti listrik, air bersih, telekomunikasi dan akses jalan.
- e) Analisis data kedaruratan : menganalisis data yang terkumpul untuk memberikan gambaran situasi terkini, memproyeksikan kebutuhan dan mendukung pengambilan keputusan cepat oleh Pimpinan BPBD.
- f) Penyusunan laporan kedaruratan : menyiapkan laporan harian atau berkala mengenai perkembangan situasi kedaruratan, jumlah korban dan penanganan yang telah dilakukan.
- g) Koordinasi data dengan pihak terkait : memastikan data kedaruratan terdistribusi dengan baik kepada instansi terkait(TNI,POLRI,DINKES BASARNAS.DINSOS,dll) untuk koordinasi penanganan yang terpadu.

2. Logistik Bencana

- a) Pengumpulan data kebutuhan dasar : mendata kebutuhan dasar Masyarakat terdampak seperti pangan, sandang, obat-obatan,selimut,tenda,air bersih dan sanitasi.
- b) Inventarisasi stok logistic : mencatat data ketersediaan stok logistic di Gudang BPBD
- c) Pemantauan distribusi bantuan : memantau dan mencata aliran distribusi bantuan mulai dari pengadaan, penyimpanan hingga penyaluran kepada

korban bencana.

- d) Manajemen data bantuan : mengelola dan penerimaan dan pengeluaran barang/uang bantuan termasuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
- e) Analisis kebutuhan logistic : menganalisis data untuk memprediksi kebutuhan logistik dimasa mendatang dan mengidentifikasi potensi kekurangan atau kelebihan pasokan.
- f) Penyusunan rencana kebutuhan logistic : Menyusun rencana kebutuhan logistic berdasarkan data yang ada termasuk pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan logistic.
- g) Pelaporan logistic : menyiapkan laporan tentang pengelolaan dan distribusi logistic termasuk kendala yang dihadapi dan rekomendasi perbaikan.

B. Kinerja Pengembangan

Selama menjalani pengabdian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai pengelola data kebencanaan ada beberapa permasalahan yang dapat menghambat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan bencana. Dimana kurangnya dukungan dari Masyarakat diantaranya :

- a) Masih kurangnya kesadaran kelompok Masyarakat terhadap ancaman bahaya kebakaran hutan dan lahan, serta minimnya peralatan dan mahalnya harga peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
- b) Belum terbentuknya kelompok Masyarakat peduli terhadap bencana
- c) Keterbatasan anggaran yang berkaitan dengan bantuan kebencanaan untuk Masyarakat.
- d) Kurangnya pengetahuan tentang keselamatan saat terjadi bencana.

Identifikasi permasalahan merupakan langkah awal dalam penentuan isu strategis. Permasalahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana
- 2) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidang penanggulangan bencana

- 3) Rendahnya partisipasi Masyarakat dalam penanggulangan bencana
- 4) Belum optimalnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
- 5) Kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- 6) Kurangnya pengetahuan terhadap Kesehatan dan keselamatan Kerja saat terjadi bencana.

Berdasarkan permasalahan tersebut langkah selanjutnya menentukan permasalahan mana yang paling dominan. Dari hasil studi pendataan BPBD sebelumnya permasalahan yang paling dominan adalah “Rendahnya partisipasi Masyarakat dalam penanggulangan bencana”.

Rendahnya partisipasi Masyarakat dalam penanggulangan bencana disebabkan antara lain :

1. Minimnya pengetahuan Masyarakat tentang cara penanggulangan bencana
2. Meningkatnya aktifitas Masyarakat yang tidak ramah lingkungan
3. Minimnya peralatan dan mahalnya harga peralatan penanggulangan bencana khususnya alat pemadaman kebakaran hutan dan lahan
4. Kurangnya kesadaran kelompok Masyarakat terhadap ancaman bencana
5. Banyak masyarakat belum memahami prinsip dasar K3 maupun penanggulangan bencana

Yang menjadi penyebab dari masalah “ Rendahnya partisipasi Masyarakat dalam penanggulangan bencana” adalah :

1. Kurangnya edukasi dan sosialisasi kebencanaan kepada Masyarakat
2. Hilangnya budaya Masyarakat adat dan kearifan local dalam menjaga fungsi lingkungan hidup
3. Rendahnya pemahaman Masyarakat tentang bencana
4. Terbatasnya anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
5. Kurangnya program pemerintah yang berorientasi pada pemberdayaan Masyarakat dalam penanganan bencana.
6. Rendahnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang K3 dan Penanggulangan Bencana

Sebagai kegiatan nyata untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja penanganan kebencanaan Penulis menggunakan salah satu inovasi yaitu inovasi pengembangan sumber daya manusia, yang dapat diartikan sebagai perubahan

kebijakan untuk meningkatkan kualitas tata nilai dan kapasitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Pembentukan Pojok Siaga Bencana yang berada di setiap daerah daerah rawan bencana, merupakan edukasi berbentuk brosur, leaflet maupun informasi tentang kebencanaan yang dapat dibaca oleh Masyarakat setempat dan mudah dipahami.

Tujuan dari penulis penggunaan inovasi Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu Pojok Siaga Bencana dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat pada Program Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu ;

a. Tujuan Jangka Pendek

Membangun dan mengaktifkan Pojok Siaga Bencana sebagai pusat edukasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana di tingkat desa atau kelurahan, sehingga masyarakat mendapatkan akses informasi yang mudah dan praktis mengenai langkah-langkah kesiapsiagaan serta pertolongan pertama. Dalam waktu singkat, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam program kesiapsiagaan bencana, serta terbentuknya kelompok-kelompok relawan yang siap tanggap dalam menghadapi situasi darurat.

b. Tujuan Jangka Menengah

Memperkuat kapasitas masyarakat melalui pembentukan kelompok siaga bencana yang terorganisir dan terlatih dalam pertolongan pertama, pemantauan dini, dan mitigasi risiko bencana berbasis komunitas. Pada tahap ini, Pojok Siaga Bencana berperan sebagai pusat koordinasi dan pendampingan yang mempererat kerjasama antara petugas kesehatan, BPBD, serta elemen masyarakat sehingga program kesiapsiagaan dapat berjalan lebih terstruktur dan berkelanjutan.

c. Tujuan Jangka Panjang

Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang mandiri dan tangguh dalam menghadapi bencana, dengan budaya sadar bencana yang kuat dan sistem kesiapsiagaan kesehatan yang terintegrasi di seluruh lapisan komunitas. Pojok Siaga Bencana diharapkan menjadi institusi tetap yang berperan sebagai pusat pembelajaran, koordinasi, dan inovasi dalam upaya mitigasi risiko bencana, sehingga mampu meminimalkan dampak bencana dan meningkatkan ketahanan sosial serta kesehatan masyarakat secara

menyeluruh.

Manfaat dari penggunaan inovasi Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu Pojok Siaga Bencana dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat pada Program Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Kotawaringin Barat dibagi menjadi manfaat internal dan manfaat eksternal, yaitu :

a) Manfaat Internal :

Inovasi Pojok Siaga Bencana memberikan manfaat langsung bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan petugas kesehatan sebagai pelaksana program. Dengan adanya pojok ini, proses edukasi dan pelatihan kesiapsiagaan dapat dilakukan secara lebih terstruktur, terfokus, dan efisien. Petugas kesehatan memiliki media yang efektif untuk menyampaikan informasi dan memantau perkembangan kesiapsiagaan masyarakat secara berkala. Selain itu, inovasi ini meningkatkan kapasitas internal petugas dalam hal koordinasi, komunikasi, dan pengelolaan sumber daya kesiapsiagaan bencana di tingkat komunitas. Pojok Siaga Bencana juga mempermudah pengumpulan data dan evaluasi program, sehingga perencanaan penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran.

b) Manfaat eksternal :

Bagi Masyarakat dan lingkungan sekitar, Pojok Siaga Bencana memberikan akses mudah terhadap informasi penting terkait kesiapsiagaan dan mitigasi risiko bencana, khususnya dari aspek kesehatan. Inovasi ini meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menghadapi bencana, serta memperkuat kemampuan komunitas untuk melakukan tindakan preventif dan responsif secara mandiri. Dengan demikian, risiko dampak bencana dapat diminimalkan dan keselamatan masyarakat lebih terjamin. Selain itu, Pojok Siaga Bencana berperan sebagai pusat pembelajaran dan koordinasi yang mendorong terbangunnya jejaring kolaborasi antar masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait lainnya dalam rangka menciptakan lingkungan yang lebih tangguh terhadap bencana.